



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SETYO BUDI HARTONO
2. Jabatan : KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
3. NHK : 215997

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.741.902.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 182 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.023.466.000
2. Tanah Seluas 5200 m2 di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 104.000.000
3. Tanah Seluas 2040 m2 di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 40.800.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 305 m2/80 m2 di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 589.030.000
5. Tanah Seluas 487 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 906.794.000
6. Tanah Seluas 2217 m2 di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 31.038.000
7. Tanah Seluas 3341 m2 di KAB / KOTA BLORA, HASIL SENDIRI Rp. 46.774.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 312.000.000

1. MOTOR, PIAGGIO SCOOTER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT MB PENUMPANG Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 295.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 54.158.002**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 489.055.869



F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 4.597.115.871

III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.597.115.871

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.